# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



# DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya jualah maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan rencana yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2018- 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023. Rencana kerja memuat hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pada 1 (satu) tahun yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2022

ala ADinas, Peternakan dan Perikanan Upaten Siden eng Rappang

Nip. <del>19640</del>317 199510 1 002

ii

# **DAFTAR ISI**

KATA PE	NGA	NTAR	ii
DAFTAR	ISI		iii
DAFTAR	TAB	EL	iv
BAB I. PI	ENDA	AHULUAN	1
	l.1.	Latar Belakang	1
	I.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	I.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II.	HAS	SIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAEF	RAH
	TAF	IUN LALU	6
	II.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	dan
		Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	II.2.	·	22
	II.3.		29
	II.4.		31
	II.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III.	TUJ	IUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
		. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
		. Telaan Terhadap Kebijakan Provinsi	59
	III.3	. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan	
		Perikanan	61
BAB IV.	REI	NCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
RAR V	DEN	JI ITI ID	73

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Perikanan	23
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	32
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	45
Tabel 3.1	Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi	60
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	64

## BAB I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD, dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD harus berdasarkan hasil verifikasi renja SKPD. Sehingga antara renja SKPD dengan dokumen RKPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Visi "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera" yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: "Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.. Dengan memperhatikan visi dan misi, maka dapat dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang senantiasa diletakkan pada pemanfaatan potensi

sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan peternakan dan perikanan terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### I.2 Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26)
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61)
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023)

- Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
- 17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sampai dengan 2023.
- 18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

### I.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

- a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Tahun 2023 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas
- b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas

#### 2. Tujuan

- Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang selaras dan terpadu, komperehensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- c. Tersedianya Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 sampai dengan 2023.
- d. Terakumulasinya usulan hasil musrembang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu penting Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiPerangkat Daerah
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- III.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV. PENUTUP

## BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

# II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya dan capaian Renstra SKPD pada Dinas Peternakan dan Perikanan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (2021).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 terdiri :

- 1. Program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 16 unit tapi yang terealisasi 5 unit, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 84 kali, terealisasi 74 kali. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 unit, terealisasi 9 unit, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 unit, terealisasi 9 unit.
  - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan
     Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan

Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 9 unit, yang terealisasi 6 unit.

### 2. Program yang memenuhi target kinerja, yaitu

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Menyurat dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Iasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana

- Usaha Perikanan Tangkap dan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dengan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
- g. Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

### 3. Program yang melampaui target kinerja, yaitu

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan target 2.930

- ekor, terealisasi 4.739 ekor. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan target 2.000 ekor, terealisasi 8.437 ekor.
- b. Program Perizinan Usaha Pertanian, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dengan Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dengan target 50 dokumen, terealisasi 53 dokumen.
- 4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
  - Adanya pengurangan anggaran untuk penanganan Covid 19 melalui refocussing yang berakibat pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan
  - Besarnya persentase anggaran yang akan dicairkan pada triwulan IV sementara untuk proses pencairan harus menunggu penetapan APBD Perubahan.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah
  - Bagi program yang tidak memenuhi target maka implikasi yang timbul adalah:
  - a. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pada lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga mempengaruhi kinerja perangkat daerah
  - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pada pelaku usaha
- 6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu

alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dan mendukung pencapaian visi misi Bupati Sidenreng Rappang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1

# Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan

Lembar : 1 dari 15 Halaman

					Reali Tare Kine	get erja	Target dan Realisasi Target Renja Perangkat Tahun 2021	(inerja Progran Lalu 2021	n dan Kegiat	tan Tahun			Perkiraan Re Capaian Ta Renstra Pera Daerah s/d berjala	arget angkat tahun n	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian (Rer Perai Daerah	Kinerja Program nstra ngkat ) Tahun 123	Ha Prog da Kelua Kegia s/ deng tah 202	ram in aran atan d gan un	Perangk	at Tahun	Realisasi Perangkat tahun i	Daerah	Tingkat Realisasi (%)	dan l	: program kegiatan In 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022	Ting kat Capa ian Reali sasi Targ et Rens tra (%)
1	2	3		4	5	<del>,</del>		Perangkat Tahun	7		8=(7/6)		9	10=(5+7+ 9)	11=( 10/4 )
3.03.01	Urusan pilihan														
	Kelautan dan Perikanan														
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	100	persen	0	-	100	persen	100	persen	100	100	persen	200	2

3.2	5.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap	2.800	ton	0	1	2691,5	ton	2692,8	Ton	100,05	2745 ,37	Ton	5.438,17	1,94
3.29	5.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (unit)	2	unit	0	1	1	unit	1	Unit	100,00	2	Unit	3	1,5
3.2	5.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap (Unit)	515	unit	0	-	515	unit	515	Unit	100,00	515	Unit	1030	2
3.2	5.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil	100	persen	0	-	100	persen	100	persen	100,00	100	Persen	200	2
3.2	5.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)	40	orang	0	-	40	orang	40	Orang	100,00	40	Orang	80	2
3.2	5.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100	persen	0	-	100	persen	100	persen	100,00	100	persen	200	2
3.2	5.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	673,72	ton	0	-	611,09	ton	1351,61	Ton	221,18	641,6 4	Ton	1.993,25	2,96

3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	12	unit	0	-	9	unit	9	Unit	100,00	11	Unit	20	1,67
		Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pengelolaan Pembudidaya Ikan	12	bulan	0	-	6	bulan	6	Bulan	100,00	12	Bulan	18	1,5
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	10	unit	0	-	9	unit	9	Unit	100,00	10	Unit	19	1,9
3.25.05	Program Pemgawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	70	persen	0	-	65	persen	110,9	persen	170,62	70	Persen	180,9	2,58
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	294	orang	0	-	273	orang	303	Orang	110,99	294	orang	597	2,03

3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	4	kecama tan	0	-	4	kecamatan	4	kecamata n	100,00	4	Kecamat an	8	2
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging	5.358. 011	kg	0	-	7.008.69 8	kg	2.750.266	Kg	39,24	5.127 .388	Kg	7.877.654	1,47
		Jumlah Produksi Telur	83.362 .100	kg	0	-	76.814.7 36	kg	49.903.530	Kg	64,97	80.00 5.124	Kg	129.908.6 54	1,56
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani	10	persen	0		10	persen	9,2	Persen	92,00	10	Persen	19,2	1,92
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak Yang Lahir dari Inseminasi Buatan	4532	ekor	0	1	2930	ekor	4739	Ekor	161,74	4.216	ekor	8955	1,98

3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar	100	persen	0	-	100	persen	100	Persen	100,00	100	persen	200	2
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	2000	ekor	0	-	2000	ekor	8437	Ekor	421,85	2.000	ekor	10437	5,21 85
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Luas Kebun Hijauan Makanan Ternak Yang Ditanami	1									1		1	1
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	persen			0	persen	0	Persen	0,00	100	persen	100	1
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	100	persen				persen		Persen	0,00	100	persen	100	1

3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)	2	unit			0	unit	0	Unit	0,00	2	unit	2	1
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	21	persen	0	-	21	persen	21	Persen	100,00	21	persen	42	2
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	20	persen	0	-	20	persen	20	Persen	100,00	20	persen	40	2
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Dosis Vaksinasi Massal (Dosis)	5.000	dosis	0	1	4800	dosis	4800	Dosis	100,00	8.500	Dosis	13300	2,66
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet	75	persen			0	persen	0	Persen	0,00	50	persen	50	0,67

_							_						_			
	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Didampingi Untuk Memenuhi Persyaratan Kesmavet	4	unit			0	unit	0	Unit	0,00	4	unit	4	1
	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100	persen	0	ı	100	persen	104	Persen	104,00	71,43	persen	175,43	1,75
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	100	persen	0	1	100	persen	104	Persen	104,00	100	persen	204	2,04
	3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Perda dan Izin Usaha Peternakan Yang Diterbitkan	75	dokume n	0	1	50	dokumen	53	dokumen	106,00	50	Dokume n	103	1,37
	3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Diawasi	4	unit	0	1	4	unit	4	Unit	100,00	0	unit	4	1

3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	01:13	rasio	0	-	01:13	rasio	01:13	Rasio	100,00	01:13	persen	0,10	2
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitasi Penyuluh	100	persen	0	-	100	persen	100	Persen	100,00	100	persen	200	2
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pertemuan Penyuluh	4	kali			4	kali	4	Kali	100,00	4	kali	8	2
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan	1	kali	0	-	1	kali	1	Kali	100,00	1	kali	2	2
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	0	-	100	persen	95	Persen	95,00	100	Persen	195	1,95
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	0	-	100	persen	100	Persen	100,00	100	persen	200	2
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	2	dokume n	0	-	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokume n	4	2

	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	1	dokume n	0	-	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokume n	2	2
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun	1	dokume n	0	-	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokume n	2	2
	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	1	dokume n	0	-	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokume n	2	2
	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Yang Disusun	1	dokume n	0	-	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokume n	2	2
	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Ysng Disusun	5	Laporan	0	-	5	Laporan	5	Laporan	100,00	5	Laporan	10	2
•	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	0	-	1	persen	1	Persen	100,00	100	Persen	101	1,01
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	0	-	14	bulan	14	Bulan	100,00	12	Bulan	26	2,17
	1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1	dokume n	0	-	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	Laporan	2	2

1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	0	-	100	persen	75	Persen	75,00	100	Persen	175	1,75
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	1.200	Lembar	0	-	200	Lembar	200	Lembar	100,00	1200	Lembar	1400	1,17
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12	Bulan	0	ı	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	24	2
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	0	1	12	Bulan	9	Bulan	75,00	12	Bulan	21	1,75
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	12	Bulan	0	-	12	Bulan	9	Bulan	75,00	12	Bulan	21	1,75
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	0	-	100	Persen	75	Persen	75,00	100	Persen	175	1,75
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	28	Buah	0	-	27	Buah	27	Buah	100,00	28	Buah	55	1,96

1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40	Unit	0	-	16	Unit	5	Unit	31,25	40	Unit	45	1,12 5
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Kali	0	-	84	Kali	74	Kali	88,10	160	Kali	234	1,46
1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah	100	Persen	0	-	100	Persen	75	Persen	75,00	100	Persen	175	1,75
1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaab dan Perizinan Secara Rutin/Berkala	8	Unit	0	-	4	Unit	4	Unit	100,00	8	Unit	12	1,5
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	0	-	1	Unit	1	Unit	100,00	1	Unit	2	2
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	22	Unit	0	-	6	Unit	6	Unit	100,00	22	Unit	28	1,27

# II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam IKK RPJMD 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Sidenreng Rappang

Lembar : 1 dari 1 Halaman

		SPM/standa			Ta	rget Renstra F	Perangkat Daei	rah	Realisas	i Capaian	Proye	ksi	Catatan
No	Indikator	r nasional	IKK	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Analisis
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ng Pembibitan Kesehatan Hewan												
1	Jumlah Ternak Sapi			Ekor	41.675			-	35.947				
2	Jumlah Ternak Kambing			Ekor	6.916			-	6019				
3	Jumlah Ternak Ayam Buras			Ekor	770.284			-	565.753				
4	Jumlah Kecamatan Lokasi Pelayanan Inseminasi Buatan Yang Efektif dan Efisien dalam mendukung UPSUS SIWAB			Kecamatan	11	•	-	-	11	-	11		

į	5	Jumlah Produksi Daging		Kg	-	7.008.698	5.127.388	5.358.011	-	2.750.266	5.127.388	5.358.01 1	
6	6	Jumlah Produksi Telur		Kg	-	76.814.73 6	80.005.12 4	83.362.10 0	1	49.903.530	80.005.124	83.362.1 00	
7	7	Jumlah dosis vaksinasi massal		Dosis	9.750	4.800	8.500	5.000	8930		8.500	5.000	
8	3	Waktu Penyediaan Laporan Informasi Harga Pasar Produksi Peternakan		Bln	12	1	ı	1	12				
	9	Terwujudnya Pengembangan Agribiisnis		pkt	110	-	-	-	110		-		
1	10	Jumlah Produksi Daging		Kg	-	7.008.698	5.127.388	5.358.011	-	2.750.266	5.127.388	5.358.01 1	
1	11	Jumlah Produksi Telur		Kg	-	76.814.73 6	80.005.12 4	83.362.10 0	-	49.903.530	80.005.124	83.362.1 00	
1	12	Jumlah Ternak Yang Lahir dari IB		Ekor	-	2.930	4.216	4.532	1	4.739	4.216	4.532	
1	13	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak		Ekor	-	2.000	2.000	2.000	-	8.437	2.000	2.000	

	14	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Didampingi Untuk Memenuhi Persyaratan Kesmavet		Unit	-	-	4	4	-	-	4	4	
E	Bidan	g Perikanan											
	1	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB		%	0,65	1,21	1,24	1,26	1,21		1,24	1,26	
	2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Ton	581,99	611,09	641,64	673,72	1.197,58	611,09	641,64	673,72	
	3	Jumlah BBI Lokasi Penyediaan Sarana/Prasarana Pembenihan		BBI	4	-	-	1	4	-	1		
	4	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan		klp	33	-	-	-	33	-	0	0	
	5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Ton	1.796,28	2.691,52	2.745,37	2.800,28	2.804,3	2.692,50	2.745,37	2.800,28	

												}
6	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebar		ekor	450.000				195.000				
7	Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pengelolaan Pembudidaya Ikan		Bulan	-	6	12	12	-	6	12	12	
8	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan		unit	-	9	10	10	-	9	10	10	
9	Jumlah Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		Kecamatan	1	4	4	4	-	4	4	4	

Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan

1	Jumlah sarana dan prasarana teknologi hasil peternakan		unit	16	-	-	-	-		0	0	
2	Meningkatnya Kualitas Penyuluh Peternakan dan Perikanan			37				36				
3	Jumlah TPI Yang Dibangun/Direha b				3			1				
4	Jumlah keikutsertaan dalam pameran		kali	3				-	-			
5	Jumlah Perda dan Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan		Dok		50	50	75		53	50	75	
6	Jumlah Pertemuan Penyuluh		Kali	-	4	4	4	-	4	4	4	

7	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan			Kali	-	1	1	1	-	1	1	1	
---	---	--	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

## II.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang Peternakan dan Perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan, pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Peternakan dan Perikanan mendapatkan Isu Kebijakan Strategis yang tetap menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Peningkatan Produksi di sektor Peternakan dan Perikanan

Sejalan dengan Isu Kebijakan tersebut maka Prioritas Program/Kegiatan, maka rancangan awal Rencana Kerja SKPD dalam mewujudkan Peningkatan Produksi di Sektor Peternakan (daging dan telur) serta Perikanan (Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap).

Namun banyak permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

### 1. Permasalahan

- a. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam kemandirian berwirausaha
- b. Rendahnya legalitas berusaha bagi pelaku usaha perikanan
- c. Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak
- d. Jumlah akseptor IB masih rendah
- e. Ternak bibit sapi belum bersertifikat
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan
- g. Kurangnya tempat pemasaran hewan
- h. Perlunya penanggulangan penyakit ternak anthrax dan rabies
- i. Produktivitas dan daya saing peternakan dan perikanan masih rendah

j. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan

#### 2. Hambatan

- a. Anomali cuaca yang dapat memicu munculnya wabah penyakit menular dan gangguan kesehatan pada ternak
- b. Belum adanya standar harga minimal untuk sapronak dan hasil produksi peternakan sehingga harga tidak menentu
- c. Masih terbatasnya investor yang bergerak di sektor peternakan khususnya sapi potong.
- d. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah;

### 3. Tantangan

- a. Ketersediaan bibit unggul bermutu belum cukup;
- b. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usaha peternakan dan perikanan;
- c. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan peternak dan pembudidaya baik formal maupun informal;
- d. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi peternakan dan perikanan.
- e. Adanya potensi konflik pemanfaatan ruang sumberdaya perikanan

#### 4. Peluang

- a. Ketahanan perekonomian daerah yang baik;
- b. Komitmen pemerintah kabupaten dalam pengembangan peternakan dan perikanan;
- c. Adopsi terknologi peternakan oleh peternak semakin meningkat;
- d. Masih terbuka peluang pasar produk peternakan dan perikanan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional;
- e. Adanya kelembagaan peternakan dan perikanan baik formal maupu informal
- f. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan HMT
- g. Semakin terbukanya peluang usaha di bidang perikanan

- h. Penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) pada BBI dan CBIB
   (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) pada kelompok pembudidaya ikan
- i. Potensi SDA untuk pengembangan usaha perikanan

### II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif dan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3

#### TABEL. 3

#### **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**

Nama SKPD: Dinas Peternakan dan Perikanan

Lembar : 1 dari 11

Halaman

No			Rancangan A	Awal RKP	D		Hasil Analisis Kebutuhan								
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegia tan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					523.500.000									
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	100	persen	173.739.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	100,00	perse n	1.787.878.000			

3.25.03.2. 01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	Produksi Perikanan Tangkap	2.800, 28	ton	173.739.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	Produksi Perikanan Tangkap	2.800,28	ton	1.787.878.000
3.25.03.2. 01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Mojong	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2	unit	10.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Mojong	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	21	unit	79.790.000
3.25.03.2. 01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	130	unit	163.739.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	515	unit	1.708.088.000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11 Kecamatan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100	Persen	331.761.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11 Kecamatan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100,00	Perse n	1.827.323.310
3.25.04.2. 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	11 Kecamatan	Produksi Perikanan Budidaya	673,7 2	Ton	331.761.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	11 Kecamatan	Produksi Perikanan Budidaya	673,72	Ton	1.827.323.310
3.25.04.2. 04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	11 Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	unit	205.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	11 Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	14,00	unit	1.114.399.660
3.25.04.2. 04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	unit	126.761.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko	56,00	unit	712.923.650

111JA 202												
									ta			
3.25.05	Program Pemgawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	75	persen	18.000.000	Program Pemgawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	75%	perse n	50.500.000
3.25.05.2. 01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	294	orang	18.000.000	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	294	orang	50.500.000
3.25.05.2. 01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2	Dokum en	18.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Ko ta	2	Doku men	50.500.000

	•	•	•							1	,	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					630.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.866.892.100
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11 Kecamatan	Jumlah Produksi Daging	5.358. 011	kg	356.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11 Kecamatan	Jumlah Produksi Daging	5.127.38 8	kg	1.210.757.000
			Jumlah Produksi Telur	83.36 2.100	kg				Jumlah Produksi Telur	80.005.1 24	kg	290.000.000
3.27.02.2. 02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Persentase Akseptor Yang Dilayani	10	persen	100.000.000	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Persentase Akseptor Yang Dilayani	10%	perse n	411.070.000
3.27.02.2. 02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	11 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama n	4532	dokum en	100.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	11 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	18.128	doku men	411.070.000
3.27.02.2. 06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Persentase Ternak Yang Disebar	100	persen	256.300.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Persentase Ternak Yang Disebar	100%	perse n	1.167.758.970
3.27.02.2. 06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	11 Kecamatan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2000	ekor	256.300.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	11 Kecamatan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain	9.112	ekor	1.167.758.970

	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11 Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak	21,00	persen	273.700.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11 Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Ternak	21,00	perse n	366.135.100
-	3.27.04.2. 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	20	persen	198.700.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	20%	perse n	270.185.100
<u>-</u>	3.27.04.2. 01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11 Kecamatan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11	lapora n	198.700.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11 Kecamatan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis	8.500	lapor an	270.185.100
	3.27.04.2. 04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11 Kecamatan	Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet	75	persen	75.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11 Kecamatan	Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet	50%	perse n	95.950.000
Ę	3.27.04.2. 04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	11 Kecamatan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	4	lapora n	75.000.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	11 Kecamatan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	4	lapor an	95.950.000

3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Pangkajene Sidenreng	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100,0 0	persen	15.000.000	Program Perizinan Usaha Pertanian	Pangkajene Sidenreng	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	71,43	perse n	13.801.650
3.27.06.2. 02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	100,0	persen	15.000.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	100%	perse n	13.801.650
3.27.06.2. 02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	75	dokum en	15.000.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	50	doku men	13.801.650
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	11 Kecamatan	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Ke Iompok Ternak	1:12	Rasio	215.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	11 Kecamatan	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/K elompok Ternak	1:12	rasio	398.242.120
3.27.07.2. 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	11 Kecamatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	100	persen	215.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	11 Kecamatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	100%	perse n	398.242.120

3.27.07.2. 01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	ВРР	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	Unit	105.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	ВРР	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	unit	375.000.000
3.27.07.2. 01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	11 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	921	Unit	110.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	11 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	921	unit	23.242.120
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	8.819.278.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	perse n	8.366.162.684
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,0	persen	21.899.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran , dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00	perse n	18.734.339
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokum en	16.340.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	doku men	14.989.683

1	.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokum en	720.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	doku men	727.331
1	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokum en	422.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	doku men	426.220
1	1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokum en	877.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	doku men	850.763
1	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1	dokum en	1.724.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1,00	doku men	725.291

			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	lapora n	1.815.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	lapor an	1.015.050
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0 0	persen	8.164.798.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	perse n	7.160.545.884
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	orang	8.133.674.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	orang	7.129.110.644

1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lapora n	31.124.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lapor an	31.435.240
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	193.860.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	perse n	235.547.302
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1.446.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	3.502.680
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	92.383.500	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46	paket	105.794.622
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Lapora n	100.031.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	lapor an	126.250.000

1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	375.219.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	perse n	875.989.160
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200	Lapora n	2.688.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	lapor an	5.050.000
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapora n	53.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lapor an	106.050.000
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lapora n	4.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lapor an	12.852.250
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lapora n	314.331.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lapor an	752.036.910

1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	63.501.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	perse n	75.346.000
1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	unit	41.751.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	unit	61.610.000
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1	unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	unit	10.201.000
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	22	unit	1.750.000	Pemeliharaan/Rehab ilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	44	unit	3.535.000
						10.202.778.000						14.310.799.864

#### II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari program dan kegiatan, yang pembiayaannya bersumber dari DAU.

Sumber usulan program/kegiatan terdiri dari program SKPD dan usulan dari pemangku kepentingan. Usulan yang berasal dari masyarakat dititikberatkan pada pengadaan sarana/prasarana peternakan dan perikanan serta hewan ternak/ikan yang mana kegiatan tersebut dapat menunjang peningkatan produksi yang selama ini menjadi tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan. Usulan tersebut kemudian dirumuskan dalam forum SKPD sesuai dengan program kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan. Uraian usulan masyarakat yang berasal dari hasil Musrembang dan pokok pikiran dari anggota DPRD kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

# Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Lembar : 1 dari 7 Halaman

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	5	6
I.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
1	Kegiatan :Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase ternak yang disebar	100	persen	
а	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternk Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2000	Ekor	
	Pengadaan Ternak Kambing	Kecamatan Dua Pitue				
		- Dusun II awakaluku kel. Kalosi Alau		25	Ekor	
		Kecamatan Watang Pulu				
		- Desa BuaE		11	Ekor	

	<u> </u>			
	- Dusun I Carawali & Dusun II Cenrana Kel. Carawali	10	Ekor	
	Kecamatan Pitu Riase			
	- Desa Buntu Buangin	3	kelompok	
	Kecamatan Baranti			
	- Kelurahan Duampanua	11	Ekor	
Pengadaan Ternak Ayam	Kecamatan Dua Pitue			
	- Dusun I, II, III dan IV Kel. Kalosi Alau	1000	Ekor	
	Kecamatan Watang Pulu			
	- Desa BuaE	1000	Ekor	
	Kec. Watang Pulu			
	- Desa Mattirotasi	1000	Ekor	
	Kecamatan Tellu LimpoE			
	- Dusun I dan dusun II	2	kelompok	
Pengadaan ternak ayam buras	Kec. Dua Pitue			
	- Dusun I, II, III atau IV Kel. Kalosi Alau	1000	Ekor	
	Kecamatan Baranti			

	- Lingkungan Panreng Rijang - Panreng Lautang Kel. Mamminasae	5	Klp	
Pengadaan ternak ayam petelur	Kecamatan MaritengngaE			
	- Lingk. I dan Lingk. II Kel. Wala	2	kelompok	
	Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE dan Watang Pulu	2	kelompok	Pokir
	Kecamatan Pitu Riase, Dua PituE, Pitu Riawa	2	kelompok	Pokir
Pengadaan Ayam Arab	Kecamatan Watang Pulu			
	- Dusun I Carawali, Dusun II Cenrana Kel. Carawali	1000	Ekor	
Pengadaan ayam Dara	Kecamatan Panca Rijang, Kulo, Baranti	1	kelompok	pokir
Pengadaan Ternak Sapi	Kecamatan Watang Pulu			

	- Dusun I Ciri-ciroE,			
	Dusun II Mattiro	10	Ekor	
	Kelurahan Ciro-ciroE			
	- Desa Mattirotasi	10	Ekor	
	- Dusun I Carawali,			
	Dusun II Cenrana	10	Ekor	
	Kelurahan Carawali			
	Kecamatan Dua PituE			
	- Desa Bila	20	Ekor	
	Kecamatan Kulo			
	- Desa Bina Baru	1	Klp	
	Kecamatan Tellu			
	LimpoE			
	- Dusun I dan Dusun II	10	Ekor	
	Kecamatan Baranti			
	- Desa Tonronge	10	Ekor	
	- Dusun Tonrong			
	Rijang & Dusun	10	Ekor	
	Mattourong Salo			
	Kecamatan Pitu Riawa			
	- Desa Kalempang	20	Ekor	
Pengadaan Sapi Betina (bibit)	Kecamatan Pitu Riase			
	- Kelurahan Botto	2	Klpk	Pokir
	Kecamatan Panca	1	Klade	Dalvin
	Rijang, Kulo, Baranti	1	Klpk	Pokir

Pengadaan Sapi Dara	Kecamatan Watang Sidenreng			
	- Dusun I dan II	2	kelompok	
Pengadaan Induk Ternak Sapi	Kecamatan Kulo			
	- Dusun Tippulu dan Anrelli Kel. Kulo	40	Ekor	
Pengadaan Ternak Itik	Kecamatan Baranti			
	- Desa Tonronge Kel. Tonronge	1.000	Ekor	
	- Kelurahan Duampanua	1.000	Ekor	
	- Kel. Manisa	5	Klp	
	Kecamatan Kulo			
	- Desa Mario	10.000	Ekor	
	Kecamatan Tellu LimpoE			
	- Dusun I dan dusun II	1.000	Ekor	
	Kecamatan Maritengngae			
	- Lingk. I dan Lingk.II Kel. Wala	2	kelompok	
Pengadaan Itik Dara	Kecamatan Watang Sidenreng			
	- Kelurahan Kanyuara			Pokir

				1	kelompok	
		Kecamatan				
		MaritengngaE				
		- Kelurahan Wala		2	kelompok	Pokir
					Kerempek	
	Pengadaan Kandang Jepit	Kecamatan MaritenggaE				
		- Kelurahan Majelling		3	Unit	
II.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	21	%	
1	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)	20	%	
а	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11	Laporan	
	Pengadaan Vaksin	Kecamatan Panca lautang				
		- Dusun I Sikeppe/ II Amessangeng		50.000	Dosis	

				I	I	
	Pengadaan Vaksin Ayam Ras / Buras (AI)	Kecamatan Maritenggae				
		- Desa Allakuang		50.000	Dosis	
		Kecamatan Panca Rijang, Kulo, Baranti		1	kelompok	Pokir
	Pengadaan Desinfektan	Kecamatan Panca Rijang, Kulo, Baranti		1	kelompok	Pokir
Ш	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100	%	
1	Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Produksi Perikanan Budidaya	673,72	Ton	
а	Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit	
	Double on Bile it Head	Kanamatan Kula				
	Bantuan Bibit Ikan	- Dusun Tippulu dan Dusun Anrelli Kelurahan Kulo		10.000	Ekor	
		Kecamatan Pitu Riase - Desa Bila Riase		10.000	Ekor	

	1			
	Kecamatan Panca			
	Lautang			
	- Desa Bapangi	10.000	Ekor	
	Kecamatan Pitu Riase			
	- Desa Buntu Buangin	10.000	Ekor	
	Kecamatan Watang Sidenreng			
	- Desa damai	10.000	Ekor	
	Kecamatan baranti	10.000	Z.KOT	
	- Dusun Tonrong rijang			
	dan Dusun Mattonrong Salo	20.000	Ekor	
	Kecamatan Pitu Riawa			
	- Desa Bulu Cenrana	10.000	Ekor	
Pengadaan Bibit Ikan Mas	Kecamatan Dua PituE			
	- Dusun II dan Dusun IV BampangngE kel. Alosi Alau	10.000	Ekor	
Pengadaan Bibit Ikan Mas dan Nila	Kec. Panca Lautang			
	- Dusun I Carawali dan Dusun II Lamange Kelurahan Corawali	20.000	Ekor	
	Kecamatan Pitu Riase			
	- Desa Leppangeng	10.000	Ekor	

1	<u> </u>	_	_	•	1	
		Kecamatan Pitu Riawa				
		- Desa kalempang		20.000	Ekor	
	Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan	Kecamatan Watang Pulu				
		- Dusun I Carawali dan dusun II cenrana		10.000	Ekor	
				15	Zak	
		Kecamatan Baranti				
		- Kessi Pute, Kel. Passeno		10.000	Ekor	Pokir
				15	Zak	
	Pengadaan Pakan Ikan	Kecamatan Panca Rijang				
		- Desa Cipotakari Dusun I Penanong Kelurahan Cipotakari		15	Zak	
b	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit	
	Bantuan Mesin Pelet Ikan					
		Kecamatan Kulo, Baranti, Panca Rijang		1	Unit	Pokir

	Pengadaan kolam terpal dan bibit	Kecamatan				
	ikan	MaritengngaE				
	IKali	- Lingkungan I dan II		4	Paket	
		kelurahan Wala		1		
				10.000	Ekor	
	Pengadaan Kolam terpal	Kecamatan Tellu LimpoE				
		- Desa Teppo		4	Paket	
	Pengadaan Bioflok	Kecamatan Panca Rijang, Kulo, dan Baranti		1	Unit	Pokir
	Pengadaan Kolam Ikan	Kecamatan Dua Pitue, Kalosi		1	Unit	Pokir
v	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	100	%	
1	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		Produksi Perikanan Tangkap	2.800,28	Ton	
а	Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Terjamin dan Tersedia	515	Unit	

Pengadaan Perahu dan Alat	Kecamatan Panca			
tangkap	lautang			
	- Lingkungan Cilellang dan Orai Salo	1	Unit	
		20	Set	
	- Panca Lautang	1	Unit	Pokir
		20	Set	
	- Panca Lautang	1	Unit	Pokir
		20	Set	
	- Allesalewo	1	Unit	Pokir
		20	Set	
	- Allesalewo	1	Unit	Pokir
		20	Set	
	Kecamatan Pitu Riawa			
	- Desa Bulu Cenrana	1	Unit	
		20	Set	
	Kecamatan Tellu LimpoE			
	- Desa Teteaji	1	Paket	
	- Tellu Limpoe	1	Unit	Pokir
		20	Set	
	- Tellu Limpoe	 1	Unit	Pokir
		20	Set	
	- Tellu Limpoe	1	Unit	Pokir
		 20	Set	

	Karamatan Mata				
	Kecamatan Watang				
	Sidenreng				
	- Empagae		1	Unit	Pokir
			20	Set	
Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Kecamatan Tellu Limpoe				
	- Dusun II Sukeppe		1	Paket	
Program Penyuluhan Pertanian		Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	1:13	Rasio	
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	100	%	
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	921	unit	
Pelatihan Budidaya Ikan		Kecamatan Panca Lautang			
		- Lingkungan Cilellang & Orai salo	1	Klp	
		Kecamatan Pitu riase		•	

	Kecamatan Watang Pulu			
	- Desa Mattirotasi, Kel. Mattirotasi	1	Kelompok	
Pelatihan ternak ayam kampung	Kecamatan Watang Pulu	1	Kelompok	
	- Desa Mattirotasi			
Pelatihan ternak sapi	Kecamatan Watang Pulu	1	Kelompok	
	- Desa Mattirotasi			
Pelatihan Pemanfaatan Jerami				
menjadi pakan ternak	Kecamatan Baranti	1	Kelompok	
	- Dusun Baranti Wattang			
	- Dusun Simpo			
	- Dusun Padacenga Rijang			
	- Dusun Kessi Pute			

#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dalam tahapan ketiga RPJMD (2019-2023) Kabupaten Sidenreng Rappang, kondisi pembangunan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejateraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu IPM meningkat, PDRB meningkat, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka harapan hidup.

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujun dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises.
- Meningkatnyaa nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan
- c. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- d. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Untuk subsektor Perikanan, kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang dimuat dalam RPJMN 2020 -2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan pada penyerapan lapangan pekerjaan dan peningkatan devisa dengan 5 (lima) arah kebijakan yang mencakup:

a. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat

- b. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan
- c. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan invenstasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan
- d. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumberday kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait
- e. Penguatan SDM dan dan inovasi riset kelautan dan perikanan

#### III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi

Tema RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah "Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulwesi Selatan Tahun 2023 antara lain:

- a. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Penguatan infrastruktur wilayah
- c. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
- d. Penurunan kesenjangan social ekonomi
- e. Peningkatan pembangunan manusia
- f. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
- g. Pelestarian lingkungan hidup

Tema RKPD Kabupaten Sidrap tahun 2023 adalah "Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera" dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan
- b. Penguatan perekonomian daerah
- c. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
- f. Pengembangan kawasan pedesaan
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman

Program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum pada table 3.1

Tabel 3.1. Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Propinsi

No	Prioritas Nasional	Prioritas	Prioritas	Program
		Propinsi	Kabupaten	Pembangunan
		Sulawesi Selatan	Sidenreng	Daerah
			Rappang	
1	Memperkuat	Penurunan	Penguatan	Program
	Ketahanan	Kesenjangan	perekonomian	Pengelolaan
	Ekonomi Untuk	Sosial Ekonomi	daerah	Perikanan
	Pertumbuhan			Tangkap
	Berkualitas dan			
	Berkeadilan			
				Program
				Pengelolaan
				Perikanan
				Budidaya
				Program
				Pengawasan
				Sumberdaya
				Kelautan dan

		Perikanan
		Program
		Penyediaan dan
		Pengembangan
		Sarana Pertanian
		Program
		Pengendalian
		Kesehatan Hewan
		dan Kesehatan
		Masyarakat
		Veteriner
		Program
		Perizinan Usaha
		Pertanian
		Program
		Penyuluhan
		Pertanian

#### III.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera" yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: "Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat".

#### 1. Tujuan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Adapun tujuan rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan adalah : " Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan dan Perikanan".

#### 2. Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut maka Dinas Peternakan dan Perikanan menetapkan sasaran sebagai berikut "Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Sub Sektor Peternakan dan Perikanan".

#### 3. Indikator Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Dalam evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan maka yang menjadi indikator sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah :

- a. Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB
- b. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

#### **BAB IV**

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019-2023.

Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Rencana kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur, dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

#### TABEL 5.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan		Reno	ana Tahun 20	023 (Tahun Renca	na)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DAU			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				523.500.000				523.500.000
3.25.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	100	173.739.000	DAU		100	173.739.000

3.25.3.201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	2.800,28	173.739.000		2.800,28	173.739.000
3.25.3.201.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	TPI Mojong	2	10.000.000		2	10.000.000
3.25.3.201.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	130	163.739.000		130	163.739.000
3.25.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	11 Kecamatan	100	331.761.000	DAU	100%	331.761.000
3.25.4.204	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	11 Kecamatan	673,72	331.761.000		673,72	331.761.000
3.25.4.204.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	2	205.000.000		2	205.000.000
3.25.4.204.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	10	126.761.000		10	126.761.000

3.25.5	Program Pemgawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang	75	18.000.000	DAU	75	18.000.000
	Perikanan	renkanan	Sidenreng dan Pitu Riase					
3.25.5.201	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	294	18.000.000		294	18.000.000
3.25.5.201.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	2	18.000.000		2	18.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				630.000.000	DAU		630.000.000
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Daging	11 Kecamatan	5.358.011	356,300,000	DAU	5.358.011	356,300,000
		Jumlah Produksi Telur	Recamatan	83.362.100	330.300.000		83.362.100	300.300.000

3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani	11 Kecamatan	10	100.000.000		10%	100.000.000
3.27.2.202.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	11 Kecamatan	36	100.000.000		36	100.000.000
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar	11 Kecamatan	100	256.300.000		100	256.300.000
3.27.2.206.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	11 Kecamatan	#REF!	256.300.000		2000	256.300.000
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	11 Kecamatan	21,00	273.700.000	DAU	21,00	273.700.000
3.27.4.201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	11 Kecamatan	20	198.700.000		20%	198.700.000
3.27.4.201.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11 Kecamatan	11	198.700.000		11	198.700.000

3.27.4.204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet	11 Kecamatan	75	75.000.000		75	75.000.000
3.27.4.204.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	11 Kecamatan	4	75.000.000		4	75.000.000
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Pangkajene Sidenreng	100,00	15.000.000	DAU	100,00	15.000.000
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,00	15.000.000		100,00	15.000.000
3.27.6.202.1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	75	15.000.000		75	15.000.000
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	11 Kecamatan	1:13	215.000.000	DAU	1:13	215.000.000

3.27.7.201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	11 Kecamatan	100	215.000.000		100	215.000.000
3.27.7.201.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pertemuan Penyuluh	BPP	4	105.000.000		4	105.000.000
3.27.7.201.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan	11 Kecamatan	1	110.000.000		1	110.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100	8.819.278.000	DAU	100	8.819.278.000
X.XX.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,00	21.899.000		100,00	21.899.000
X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	16.340.000		2	16.340.000
X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	720.000		1	720.000
X.XX.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	422.000		1	422.000
X.XX.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	877.500		1	877.500
X.XX.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Disusun	Dinas Peternakan dan	1	1.724.000		1	1.724.000

			Perikanan					
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD yang Disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan	5	1.815.500		5	1.815.500
X.XX.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,00	8.164.798.000		100,00	8.164.798.000
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Peternakan dan Perikanan	90	8.133.674.000		90	8.133.674.000
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	31.124.000		1	31.124.000
X.XX.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	193.860.500		100	193.860.500
X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1.446.000		1	1.446.000
X.XX.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	5	92.383.500		5	92.383.500

X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	160	100.031.000		160	100.031.000
X.XX.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	375.219.500		100	375.219.500
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.200	2.688.000		1.200	2.688.000
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dinas Peternakan dan Perikanan	12	53.400.000		12	53.400.000
X.XX.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	12	4.800.000		12	4.800.000
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	12	314.331.500		12	314.331.500
X.XX.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	63.501.000		100	63.501.000
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaab dan Perizinan Secara Rutin/Berkala	Dinas Peternakan dan Perikanan	8	41.751.000		8	41.751.000
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Dinas Peternakan dan	1	20.000.000		1	20.000.000

			Perikanan						
X.XX.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Dinas Peternakan dan Perikanan	22	1.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	22	1.750.000	
					10.202.778.000			10.202.778.000	

#### BAB V.

#### PENUTUP

Rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada Renstra tahun 2018-2023. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sangat ditentukan oleh alokasi pagu anggaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesamaan persepsi baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada SKPD pelaksana. Disamping itu, dalam pelaksanaan dokumen renja ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen Renja ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penyusunan Renja ini semoga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2022

